BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik KUA Kertak Hanyar dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perkawinan tidak tercatat masih menunjukkan adanya penyimpangan dari aspek normatif. Dalam beberapa kasus, KUA menyetujui penetapan wali nasab hanya berdasarkan surat pernyataan dan dokumen administratif tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Padahal, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan asas kewenangan administrasi negara, yang menegaskan bahwa status wali nasab bagi anak yang tidak tercatat secara hukum hanya dapat ditetapkan melalui proses yudisial. Dengan demikian, secara hukum, kewenangan untuk menetapkan wali nikah berada pada Pengadilan Agama, bukan pada KUA.
2. Dasar hukum yang seharusnya menjadi pijakan dalam menentukan sah atau tidaknya wali nikah bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 yang telah ditafsir ulang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini membuka peluang pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologis, tetapi mensyaratkan pembuktian melalui lembaga hukum, bukan hanya berdasarkan pernyataan administratif. Oleh karena itu, segala bentuk keputusan tentang keabsahan nasab dan penetapan wali nikah seharusnya diputuskan oleh Pengadilan Agama melalui permohonan penetapan wali hakim.

3. Dengan demikian, praktik penetapan wali nikah oleh KUA Kertak Hanyar belum sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam fiqh, penetapan wali harus berdasarkan bukti nasab yang sah secara syar'i, sedangkan dalam hukum nasional, hubungan perdata antara anak dan ayah biologis harus dibuktikan melalui mekanisme yudisial. Tanpa dasar hukum yang sah, penetapan wali oleh KUA berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan pernikahan. Oleh karena itu, pendekatan normatif dan prosedural melalui jalur pengadilan merupakan satu-satunya langkah yang dapat menjamin keabsahan wali dan pernikahan, baik dari aspek hukum agama maupun hukum negara.

B. Saran-saran

1. Untuk KUA: KUA perlu memperkuat verifikasi hubungan ayah dan anak dari perkawinan tidak tercatat melalui riwayat pergaulan, dokumen resmi seperti KK, akta kelahiran, atau putusan pengadilan. Jika tidak terbukti sah, penetapan wali harus dialihkan ke wali hakim. Selain itu, KUA juga perlu meningkatkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah kepada masyarakat.
2. Untuk Masyarakat: Pasangan yang menikah tidak tercatat sebaiknya segera mengurus pencatatan nikah di KUA atau melalui itsbat nikah di pengadilan agar anak dan keluarga memiliki perlindungan hukum yang jelas.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya: Perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang tantangan KUA dalam memverifikasi dokumen wali nikah dan dampaknya terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat, baik secara hukum maupun sosial.